

SENTRALISME DAN PERLAWANAN DAERAH: DIALEKTIKA PERJALANAN SEJARAH BANGSA PASKAKOLONIAL (1945-2005)

Mestika Zed

Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
meztikazed@yahoo.com

ABSTRACT

So that in the nature of man, we find three principal causes of quarrel. First, competition; secondly, diffidence; thirdly, glory. The first, make at men invade for gain; the second, for safety, and the third, for reputation. The first use violence, to make themselves masters of other men's persons, wives, children, and cattle; the second, to defend them; the third, for trifle as a word, a smile, a different opinion, and any other sign of under value, either defect in their persons, or by reflection in their kindred, their friends, their nation, their profession, or their name.

Thomas Hobbes, Leviathan, 1651.

Key Words: *Centralism, regional resistance, nation's history.*

ABSTRAK

Sehingga dalam sifat manusia, kita menemukan tiga penyebab utama pertengkarannya. Pertama, persaingan; kedua, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri; ketiga, kemuliaan. Yang pertama, membuat manusia menyerang untuk memperoleh keuntungan; kedua, untuk keamanan, dan ketiga, untuk reputasi. Pertama menggunakan kekerasan, untuk membuat diri mereka tuan dari manusia lain, istri, anak-anak, dan ternak; kedua, untuk membela mereka; ketiga, untuk hal-hal yang sepele seperti kata, senyum, pendapat yang berbeda, dan tanda-tanda lain yang tak bernilai, baik cacat dalam diri mereka, atau dengan refleksi dalam keluarga mereka, teman-teman mereka, bangsa mereka, profesi mereka, atau nama mereka.

Thomas Hobbes, Leviathan, 1651.

Kata Kunci: Sentralisme, perlawanan daerah, sejarah bangsa.

A. Pendahuluan

Sejarah Indonesia modern sejak proklamasi 1945 sampai sekarang adalah sejarah transisi yang tersandung-sandung dari satu rejim ke rejim lain, dari suatu sistem ke sistem lain dan seringkali sangat rentan terhadap perpecahan. Tiap kali terjadi pergantian kekuasaan, bangsa ini hampir selalu berhadapan dengan situasi krisis, guncangan kekerasan,

dan perpecahan, meskipun sesudah itu selalu ada upaya untuk merajut kembali keutuhan seperti sedia kala. Sewaktu memberikan reaksinya terhadap situasi krisis ini, para pemimpin yang berada di pusingan kekuasaan seringkali berpaling kepada sejarah dan budaya bangsa, karena hanya dengan itulah identitas bersama dapat dipupuk kembali guna

membantu melindungi ras solidaritas bersama dari ancaman disintegrasi.

Sejak itu, harapan demi harapan pun digulirkan kembali, biasanya dengan menawarkan format politik baru sebagai anti-tesis terhadap rejim sebelumnya, tetapi kemudian dalam perjalanannya jarum bandul kembali bergeser ke arah yang tadinya ditolak. Dalam situasi semacam itu, Indonesia kelihatan tak kunjung mampu keluar dari lingkaran semula karena terperangkap ke dalam apa yang oleh antropolog Clifford Geertz disebut *state-manque*, yaitu suatu keadaan di mana negara berputar-putar pada dilemma yang sama tanpa benar-benar menemukan titik *telos* yang ingin dicapai sebagaimana yang didambakan oleh *the founding fathers* sebelumnya.

Makalah ini tidak bermaksud untuk mengemukakan fakta-fakta baru atau doktrin-doktrin sejarah yang mengejutkan, melainkan hanyalah sebuah upaya sederhana untuk meninjau kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tema pokok dari makalah ini ialah tentang hubungan antara negara dan masyarakat (*state-society relationship*) selama lebih enam puluh tahun Indonesia merdeka, khususnya berkenaan dengan kegagalan rejim-rejim sipil dan militer mensintesis sejarah bangsa¹,

¹ Beberapa ulasan gagasan pokok dari makalah ini pernah dimuat dalam *Kompas* (21 September 2006), hlm. 2 yang dipetik dari presentasi makalah saya yang disampaikan pada acara peluncuran dan bedah buku B.J. Habibie, *Detik-Detik Yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* (Jakarta: THC Mandiri, 2006),

sehingga pada gilirannya menimbulkan perbenturan politik, militer dan ekonomi antara pusat dan daerah. Makalah ini ingin menjelaskan gerigi-gerigi tajam yang menimbulkan percekocokan antara pusat dan daerah, khususnya berkenaan bentuk-bentuk dominasi pusat yang dilembagakan Jakarta untuk menciptakan dan mempertahankan subordinasi daerah dan reaksi daerah terhadap dominasi pusat.

B. Dominasi Pusat v.s. Subordinasi Daerah

Barangkali tak ada sarjana yang segamblang Ben Anderson dalam melukiskan garis perkembangan sejarah Indonesia dari Jan Pieterszoon Coen hingga Suharto². Antara Jan Pieterszoon Coen dan Suharto terbentang waktu lebih tiga setengah abad. Dalam rentang waktu yang demikian panjang itu, telah terjadi pergantian rejim dari suatu penguasa ke penguasa berikutnya; dari rejim penguasa VOC ke rejim penguasa kolonial Hindia-Belanda, yang kemudian digantikan oleh rejim Indonesia merdeka. Namun begitu, konsep nasionalisme modern yang mendasari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbukti tidak menghasilkan suatu sintesis sejarah baru, melainkan terlanjur sudah terkontaminasi imajinasi politik Jawa, yang diadopsi dan diteruskan VOC dan penguasa kolonial Hindia-

pp. 545, termasuk indeks. Jakarta, 21 September 2006.

² Lihat Ben Anderson. 1983. "Old State, New Society: Indonesia's New Order On Comparative Historical Perspective". *Journal Of Asian Studies*. 42 No. 3 (1983):477-98.

Belanda, dan yang kemudian diambil lagi oleh rejim Suharto.

Gagasan-gagasan Ben Anderson mengenai kompleksitas hubungan antara masa silam dan masa kini sangatlah sugestif, terutama dalam mencermati hubungan antara negara dan masyarakat (*state-society relationship*), di mana dominasi kekuasaan Jawa sangat dominan dan menentukan bagi terciptanya gerigi-gerigi tajam yang pada gilirannya membawa bangsa ini pada pertikaian terus-menerus, terutama tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Gagasan dan praktek sentralisasi kekuasaan Orde Baru, sebagaimana dikemukakan Anderson, bukanlah melulu produk sejarah Indonesia modern. Ia merupakan hasil dari perkembangan sejarah yang panjang selama lebih dari tiga abad sejak Belanda secara lambat laun tapi pasti membangun imperiumnya di Nusantara, tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang pada akhirnya diberi nama Hindia-Belanda itu. Beberapa dari daerah tertentu bahkan baru digabungkan di bawah kontrol kekuasaan Belanda pada awal abad ke-20 atau beberapa dekade sebelum Jepang meruntuhkannya.

Selama revolusi menentang kembalinya Belanda, bermunculan demikian banyak “revolusi dalam revolusi”. Dalam kepustakaan sejarah Indonesia sering disebut “revolusi sosial”, yaitu perbentukan antara pelbagai kekuatan lokal dan representasi kekuasaan pusat yang masih lemah. Sebagaimana yang akan dilihat pada halaman-halaman berikut ini, perbenturan pusat-daerah selalu muncul setiap periode sejarah Indonesia merdeka, mulai dari era

revolusi nasional atau sering juga disebut era perang kemerdekaan dan berlanjut sampai tahun 1950-an dan zaman Orde Lama dan Orde Baru, bahkan pada rejim-rejim sesudahnya. Gejala ini menunjukkan bahwa rejim-rejim penguasa Indonesia merdeka telah gagal menciptakan hubungan perimbangan pusat-pinggiran, sehingga menimbulkan gerigi-gerigi tajam yang pada gilirannya menggoreskan luka, yang makin lama makin meruyak dan tak tersembuhkan, bahkan dalam era reformasi dewasa ini sekalipun.

Penjelasan tentang dominasi pusat atas daerah dan sifat hubungan-hubungan kekuasaan pusat-pinggiran (daerah) paska kolonial agaknya bisa dibantu dengan meminjam konsep Weber tentang “patrimonialisme” dan “neo-patrimonialisme” yang digunakan oleh beberapa sarjana kemudian untuk menggambarkan rejim negara-negara baru setelah Perang Dunia II, termasuk Indonesia.³ Di masa lalu, hampir semua negara-negara (kerajaan) tradisional di Nusantara – mungkin dengan kekecualian Minangkabau, adalah rejim patrimonial. Dalam negara patrimonial, kekuasaan pemerintah amat bergantung pada kapasitasnya untuk menerangkan dan mempertahankan kesetiaan elit-elit lokal. Karena lemahnya alat kekuasaan pusat untuk menekan atau memaksa agar lokal

³ Guenter Roth 1968. “Personal Rulership, Patrimonialism, And Empire Building in The States”, *World Politics*, XX (Januari 1968): 194-206. Konteks Indonesia era Orde Lama dan Orde Baru telah dibahas oleh Harol Crouch dalam tulisannya “Patrimonialism and Military RuLe in Indonesia”, *World Politics*, vol. XXXI (Oct. 1978-July 1979): pp. 571-89.

menerima otoritas pemerintahanya, maka penguasa pusat biasanya berupaya membangun basis ideologis di satu pihak dan basis material di lain pihak dan mendistribusikanya ke tingkat lokal sebagai imbalan atas kesetiaan mereka.

C. Revolusi Sosial dalam Era Revolusi Nasional

Selama revolusi nasional 1945-1950, hampir setiap daerah di Jawa dan Sumatera telah mengalami “revolusi sosial”, baik dalam skala kecil maupun besar. Sejarawan Audrey Kahin dalam sebuah bukunya berjudul *Regional Dynamics of the Indonesia Revolution: Unity From Diversity* (1985),⁴ telah memaparkan sejumlah kasus-kasus pergolakan daerah di beberapa tempat di Jawa dan Sumatera serta di beberapa tempat di Sulawesi dan Ambon. Memang pada awal proklamasi, mayoritas bangsa Indonesia telah menyambut perjuangan kemerdekaan Agustus 1945 dengan penuh antusiasme, suatu gejala yang tak diperkirakan oleh otoritas Belanda waktu itu, yang berniat kembali menjajah Indonesia. Meskipun demikian, persamaan pandangan tentang kemerdekaan dari penjajahan Belanda, tidak berarti terciptanya suatu gerakan yang bersatu. Sejarah organisasi pergerakan nasional sebelumnya adalah sejarah masyarakat majemuk, yang dibangun atas dasar ikatan-ikatan longgar dari waktu ke waktu, tetapi lebih sering lagi

bersaing dan berpecah belah antara yang satu dengan yang lain dan kemudian bersatu lagi, seperti yang tampak dari prakarsa lahirnya Gapi tahun 1939 atau tak lama sebelum kejatuhan Belanda.

Beberapa kecenderungan perpecahan ini tidak sepenuhnya hilang, bahkan menyisakan persoalan pada periode-periode kemudian. Perpecahan itu pun tidak selamanya bernada isu pusat-daerah. Sebagian dari perpecahan bernada persaingan ideologis antarelite pusat dan sedikit banyak juga berdampak pada hubungan pusat-daerah. Namun sejauh berkenaan dengan hubungan-hubungan kekuasaan pusat daerah, kasus-kasus yang diuraikan Kahin agaknya cukup representatif. Ada delapan pergolakan daerah yang dibahas oleh penulis berbeda-beda dan semua terjadi pada masa revolusi. Tiga diantaranya terdapat di Sumatera (Aceh, Sumatera Timur dan Sumatera Barat); tiga di Jawa (Banten, Jakarta dan “Tiga Daerah”: Brebes, Malang dan Tegal – di kawasan pantai utara Jawa Tengah dan dua yang lain di Indonesia Timur (Sulawesi Selatan dan Ambon).⁵

Kasus revolusi sosial yang terjadi di Aceh terjadi antara kelompok agama (ulama PUSA) dan kaum bangsawan lokal (*uleebalang*). Yang pertama merepresentasikan diri mereka sebagai wakil Republik berhadapan dengan kaum *uleebalang* yang oleh musuh-musuhnya dianggap kaki-

⁴ Sudah diterjemahkan ke dalam edisi Bahasa Indonesia berjudul: *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta: Gratifi Pers, 1990).

⁵Uraian tentang ini terutama bersandar kepada buku Kahin yang dikutip di atas dan artikel Heather Sutherland. 1986. “The Indonesia Revolution: The Review”, *Indonesia* No. 42 (Oktober 1986):Pp. 113-19

tangan Belanda. Di Sumatera Timur, daerah perkebunan yang relatif multi-etnik, pertentangan antara kaum Republikein dan keluarga kerajaan yang dianggap kaki tangan Belanda juga menimbulkan perbenturan dan tragedi berdarah. Revolusi sosial di Aceh lebih bercorak Islam, sementara yang terjadi di Sumatera Timur, jelas-jelas memiliki hubungan langsung dengan unsur Marxisme dalam kelompok “Persatuan Perjuangan” pimpinan Tan Malaka yang memiliki prestise tinggi di Sumatera. Kasus di Sumatera Barat relatif lebih kecil, seperti yang juga terjadi di Palembang, Bengkulu dan Lampung. Di Sumatera Barat, meskipun kedua kelompok bertikai: kelompok Islam Masyumi v.s birokrat dan kelompok militer warisan Jepang, sama-sama pendukung Republik, pergolakan itu segera dapat didamaikan. Kasus-kasus yang terjadi di Jawa (Banten, Jakarta dan Tiga Daerah) memiliki afiliasi kelompok yang berbeda-beda, dan seperti di daerah lain, pertikaian antar kelompok, dengan kekecualian di Jakarta, juga bercorak “revolusi daerah”, yaitu suatu upaya lokal untuk mengubah tatanan masyarakat lokal secara radikal, biasanya ditandai dengan terjadinya pemberontakan dari kelompok akar-rumput. Revolusi sosial pada masa ini haruslah dibedakan dari berbagai jenis konflik dan proses perubahan lainnya, terutama yang disebabkan oleh kombinasi yang ditimbulkan oleh dua kejadian yang secara kebetulan timbul secara bersamaan, yakni revolusi nasional dan terjadinya perubahan politik dan sosial. Revolusi nasional dalam arti sempit adalah revolusi politik, yang berupaya mengubah

tatanan negara kolonial ke negara nasional, tetapi tidak mengubah struktur sosial. Di Sumatera Timur, seperti ditunjukkan oleh Ann Laura Stoler, dominasi kapitalis dan perlawanan buruh perkebunan yang dimarginalkan nyaris tak mengalami perubahan dari zaman kolonial sampai pada dekade-dekade setelah kemerdekaan.⁶

Revolusi sosial yang terjadi di “Tiga Daerah” (Pekalongan) berupa aksi-aksi kekerasan dan pencopotan kepala desa dan pejabat birokrasi lebih dari sekedar persaingan dan perebutan kedudukan dalam pemerintahan yang baru semata. Ia lebih merupakan upaya menolak rekomendasi pusat yang membiarkan pejabat lama berkuasa dan mengubah badan pemerintah secara lebih demokratis dengan mengikutsertakan rakyat dalam pembentukan dewan-dewan perwakilan dalam Komite Nasional di daerah itu dan orang-orang yang mengisi badan-badan pekerja di jajaran eksekutif. Di Banten situasinya tidak banyak berbeda, dimana tiga benang merah kusut merajut sejarah Banten pada zaman revolusi; ketiga benang merah ini, seperti dibahas oleh Mihael William ialah anti-kolonialisme, regionalisme, dan revolusi sosial. Yang pertama merepresentasikan semangat Replubikein dari Jakarta, yang kedua penolakan terhadap otoritas pusat, sedang yang ketiga mengubah Banten sebagaimana yang diinginkan oleh pelakunya, yang dimotori oleh kaum ulama.

⁶ Ann Laura Stole. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatra' Plantation Belt, 1870-1979*. New Haven, and London: Yale University Press.

Kejadian di Sulawesi Selatan dan Ambon berada di luar daerah Republik; Jawa dan Sumatera. Prakarsa perundingan Linggarjati yang diprakarsai oleh pemerintah pusat telah membuat kecewa kaum revolusioner di kedua wilayah itu karena merasa dikhianati oleh pusat yang mengakui kekuasaan Belanda di luar Jawa dan Sumatera. Mengingat kekuatan bersenjata Republik di sana masih lemah, mereka akan menjadi sasaran empuk Belanda. Akan tetapi, kekecewaan terhadap pusat pada revolusi tidak hanya dialami oleh orang Sulawesi Selatan, melainkan hampir dirasakan semua daerah diluar Jawa. Ini kemudian menjadi bibit-bibit perpecahan dalam tahun-tahun sesudah revolusi.

Faktor awal yang utama dan menentukan bagi terjadinya revolusi-revolusi sosial selama revolusi ialah batas kesanggupan pemerintahan republik, negara-bangsa yang memerdekakan dirinya melalui proklamasi Agustus 1945 itu. Negara lemah, sementara pelbagai unsur dari masyarakat sangat kuat. Negara dan alat perlengkapannya pada masa ini tampaknya tidak mampu menanggapi secara proporsional pelbagai tuntutan dan daya dorong yang datang dari masyarakat yang demikian majemuk. Akibatnya, perjalanan revolusi, paling tidak pada dua tahun pertama revolusi, cenderung otonom dan berjalan sendiri-sendiri. Di atas permukaan, kerusuhan dan konflik yang mewarnai revolusi sosial di daerah-daerah republik di Jawa dan Sumatera terbelah antara “patriot Republik” dan “kaki-tangan Belanda”, tetapi pada saat yang sama ia mencerminkan “gagal negara” dalam

memerankan dirinya sebagai pusat kekuasaan yang efektif dalam membangun hubungan pusat-daerah pada masa itu.

Keadaan ini amat kontras dengan kondisi pada periode yang lebih kemudian, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pada saat mana Negara kuat dan masyarakat lemah. Demikian juga akar penyebabnya. Bila pada periode revolusi, perlawanan daerah terhadap pusat lebih disebabkan oleh tensi ideologi nasionalisme anti-kolonial yang khas zaman revolusi, yang digulirkan dari pusat daerah ternyata tidak cukup siap ditanggapi oleh Jakarta ketika titik balik dari daerah kembali menuntut keterlibatan pusat dalam memecahkan persoalan lokal. Namun karena berbagai keterbatasan, baik sumber daya kepemimpinan maupun basis materialnya, dalam hal ini termasuk alat perlengkapan pemerintahan, maka pusat tak lebih dari zona sentral yang kehilangan fungsinya di tingkat lokal. Akibat selanjutnya ialah bahwa selama hampir lima tahun perjalanannya, revolusi nasional lebih bersifat otonom, dimana inisiatif lokal lebih menonjol dan memiliki otoritas yang sampai tingkat tertentu berbenturan dengan dan bahkan telah melampaui otoritas pusat.

D. Krisis Hubungan Pusat – Daerah Tahun 1950-an

Masalah utama setelah memasuki tahun 1950-an ialah bagaimana menegakkan kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia dengan mengembangkan prinsip-prinsip, institusi-institusi, mekanisme-mekanisme dan ekspektasi-ekspektasi yang memungkinkan

Negara dan warga Negara merasa sudah merdeka, dilindungi dan memperoleh kepastian hukum, sehingga terciptanya kondisi-kondisi keberlanjutan dari cita-cita kemerdekaan sebagaimana dibayangkan dalam konstitusi dan pidato-pidato para petinggi Negara. Selepas periode perang kemerdekaan atau memasuki tahun 1950-an, instabilitas politik dan ekonomi zaman revolusi bergeser ke situasi paska perang. Sejak awal

1950-an, kabinet pemerintah jatuh bangun dan pada saat yang sama harus berhadapan dengan krisis-krisis sosial-ekonomi dan rangkaian kasus pergolakan daerah yang meletus secara hampir merata di setiap kepulauan. Beberapa kasus terpenting diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: Kasus Pergolakan Daerah Tahun 1950-an***

Kasus Pergolakan / Tokoh	Tahun	Daerah	Jumlah Korban yang Tewas
1. Kasus DI / NII R.M. Kartosuwiryo. *)	1949-1962	Jawa Barat	428 (1951/ 52) 2447 (1857)
2. Kasus DI /NII Ibnu Hadjar	1950-1954	Kalimantan Selatan	1.055 tewas, diculik dan luka
3. Kasus DI/ NII Kahar Muzakkar	1952-1953	Sulawesi Selatan	750
4. Kasus DI/ NII Amir Fattah, Brebes	1951-1954	Jawa Tengah	700
5. Kasus DI/ NII Daud Beureueh	1953-1959	Aceh	Ratusan **)
6. Kasus Kapten Andi Aziz.	5/ 4 / 1950	Sulawesi Selatan	?
7. Kasus Republik Maluku Selatan (RMS) Dr. Soumokil	25 /4 / 1950	Maluku Selatan	?
8. Kasus PRRI / Permesta : Ahmad Husein; Ventje Samual	1958-1961	Sumatera dan Sulawesi	22. 174 7000 - 8000

*) DI / NII (Darul islam / Negara islam Indonesia (DI) /NII)

***) Tidak ada angka nominal, Van Dijk (1983:95).

***) Sumber data dalam Tabel 2 ini dipetik dari Meztika Zed. 2001 "Hidden History". Sejarah kebrutalan dan kejahatan Negara. Isu-isu dan strategi dalam konteks sejarah Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan HAM* (Habibie Centre), Vol. 2 No. 1 (2001):p.27

Sudah dikatakan di muka, bahwa selama revolusi nasional, telah bermunculan revolusi-revolusi sosial di berbagai daerah di nusantara. Meskipun para pemimpinnya terdiri dari kaum nasionalis Republikein, dan mengakui negara kesatuan yang diatur dari pusat, masing-masing memiliki kepemimpinan dan afiliasi kelompok dan agenda yang berbeda-beda. Kekuasaan pusat lemah, tidak memiliki jangkauan otoritas untuk

mengawasi apa yang dilakukan di tiap daerah. Di lain pihak Belanda rupanya berhasil mengeruk keuntungan dari kepemimpinan pusat yang lemah lewat politik perundingan, dengan memaksa pimpinan Republik yang baru itu untuk menerima kehadiran negara-negara bagian di luar daerah Republik dengan struktur pemerintahan federal. Pengalaman ini memberi pelajaran kepada pemimpin Indonesia tentang betapa sulitnya

memperoleh dan memelihara pemusatan kekuasaan dan harga yang harus dibayar akibat politik perundingan yang diambilnya.

Itulah sebabnya maka pada 1950, kurang dari setahun setelah Belanda terusir dari bumi Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara yang baru segera membekukan federalisme dan sejak itu Indonesia kembali ke negara kesatuan. Namun, berbeda dengan negara kesatuan pada awal revolusi, kali ini kerangka negara kesatuan berada di bawah sistem parlementer dan bukan dalam bentuk sistem presidensial seperti yang ditetapkan UUD 1945. Karena pemerintah pusat yang baru tidak memiliki cukup sumber administratif, keuangan, dan militer untuk menjalankan kekuasaan konstitusionalnya di seluruh daerah, maka boleh dikatakan bahwa sampai akhir dekade 1950-an negara kesatuan Indonesia hanya ada di atas kertas saja. Dalam prakteknya, pemerintah daerah dan formasi militer menikmati derajat otonomi yang tinggi.

Upaya untuk menata kembali hubungan pusat daerah sebenarnya telah dirancang sedemikian serius. Sebelum meletusnya pemberontakan di Sumatera dan pulau-pulau lain di bagian timur (PRRI/Permesta), Parlemen Indonesia hasil pemilu I 1945 telah berhasil mensahkan dua Undang-Undang desentralisasi; satu diantaranya tentang pemerintah daerah, dan yang satu lagi tentang kekuasaan daerah.⁷ Produk Undang-Undang tentang otonomi daerah (UU

No. I tahun 1957) mengizinkan Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memilih sendiri pemimpin mereka masing-masing. Namun dalam prakteknya keengganan pusat untuk melaksanakan UU ini telah menimbulkan friksi-friksi daerah terhadap pusat. Padahal seandainya UU itu benar-benar dilaksanakan, langkah desentralisasi itu merupakan sebuah loncatan sejarah yang penting, mengakhiri praktek yang sudah berlangsung sejak zaman kolonial, dimana hanya pemerintah pusatlah yang dibolehkan mengangkat eksekutif daerah. Akibat logis dari reformasi tata-pemerintahan itu, mestinya berdampak positif bagi daerah, sebab seandainya UU No. 1 tahun 1957 itu dilaksanakan, ia akan mengakhiri kebiasaan pemerintah pusat di Jakarta untuk memperlakukan pemerintahan daerah sebagai subordinasi dari tangan administrasi pusat di daerah. Di Sumatera Barat, misalnya pertempuran ideologis antara partai-partai kuat yang bersaing kemudian diintervensi pusat dengan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak tahun-tahun pertama tahun 1950-an, dan mengangkat seorang gubernur dari Jawa, Ruslan Mulyoharjo. Meskipun diterima oleh partai kuat Masyumi di daerah ini, ia adalah *dropping* dari pusat dan ini juga menjadi katalisator terhadap perasaan anti-Jawa orang Sumatera Barat.

Produk Undang-Undang yang lain (UU No. 32 tahun 1956) tentang keuangan memberikan rumusan yang rumit guna mengalokasikan sumber-sumber fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena rumusnya yang begitu rumit, cara

⁷ Donal K Emmerson (ed). 2001. *Indonesia Beyod Soeharto, Negara, Ekonomi dan Masyarakat Transisi*. Edisi terjemahan. Jakarta: Gramedia.

pengoperasiannya menjadi tidak realistis. Data yang harus melandasi pemakaian formula dalam UU itu sebenarnya tidak ada atau sukar diperoleh. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, sekali lagi, daerah terkatung-katung dalam ketidakpastian untuk mewujudkan otonomi yang didambakan, mengingat UU No. 32 tahun 1956 itu lebih mencerminkan pandangan dan kepentingan partai-partai politik di pusat dimana salah satu pasalnya menyatakan bahwa sumber keuangan yang dapat diandalkan daerah merupakan syarat penting bagi pelaksanaan otonomi yang sebenarnya. UU No. 32 tidak hanya tak praktis, tetapi juga menunjukkan betapa beratnya tugas menyalurkan kembali pendapatan pemerintah dari pusat ke daerah. Reformasi tata-pemerintahan dan keuangan lewat Undang-Undang 1956-57 tidak pernah dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Sementara itu, persaingan dan percekocokan antar partai juga memperuncing hubungan pusat dan daerah. Empat partai pemenang pemilu 1955: PNI (22%), Masyumi (20,9%), NU (18,4%), dan PKI (16,4%) bersaing satu sama lain. Kesemua partai itu mendapat dukungan di Jawa, tetapi hanya Masyumi yang lebih unggul di luar Jawa, dan sebaliknya PNI, NU dan PKI identik dengan partai Jawa. Masing-masing memperbanyak organisasi massa di bawah dan masing-masing memerankan diri sebagai juru bicara yang tangguh bagi sejumlah kelompok etnis dan sosial serta daerah tertentu. Sampai tingkat tertentu tak hanya berperan sebagai juru bicara, tetapi sebagai pusat integrasi baru dalam

memperkuat posisi masing-masing dalam menciptakan sentimen kelompok dan daerah. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Masyumi telah memupuk rasa persatuan baru bagi kelompok santri perkotaan yang terpinggirkan dari arena politik. Demikian juga yang dilakukan NU terhadap kelompok santri di pedesaan. Diluar kelompok Islam, PNI dan PKI mengukuhkan diri mereka sebagai wakil dan pembantu dari beberapa kelompok sosial *abangan* yang sinkretik; umumnya di Jawa. Pertikaian partai-partai sampai tingkat tertentu mengikuti polarisasi kewilayahan dan kedaerahan, bahkan sebenarnya mengikuti garis etnik. Partai Masyumi terutama cenderung diidentifikasi sebagai partai luar Jawa yang anti Jawa. Kekuatan Masyumi di pulau Jawa terutama terdapat di kalangan etnik di Jawa Barat.

Secara politik demokrasi liberal telah gagal menunaikan harapan-harapan rakyat secara memuaskan. Jegal menjegal terhadap program kabinet, membuat pemerintahan jatuh-bangun dan ini menjadi salah satu alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengambil alih tampuk pemerintahan di kemudian hari. Tetapi kelemahan yang lebih serius dari sistem parlemen tahun 1950-an ialah terabaikan kelompok militer ditengah kebisingan perseteruan elit politik partai. Sampai tahun 1956, kedudukan tentara masih terpecah-pecah dan belum terintegrasi ke dalam system komando yang solid, meskipun waktu itu sudah ada tujuh wilayah teritorial, masing-masing dua di Sumatera, tiga di Jawa, satu di Kalimantan dan satu lagi di Makasar untuk wilayah Indonesia bagian

timur. Masing-masing berada di bawah panglimanya sendiri-sendiri dan masing-masing satuan tentara cenderung menyatukan diri dengan kawasan territorial mereka sendiri, di mana kesetiaan prajurit lebih utama kepada panglima di wilayah mereka dan bukan kepada para panglima di Jakarta atau kepada negara dalam arti luas.

Salah satu alasannya ialah bahwa nasib mereka dijamin oleh panglima mereka karena pusat tidak memiliki cukup dana untuk membiayai militer. Ini antara lain dimungkinkan karena para panglima memiliki kebebasan dalam mengorganisasikan satuan mereka dan mereka juga memiliki kuasa untuk mengintervensi pemerintah sipil di wilayah mereka masing-masing. Di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga di Sulawesi tentara melakukan bisnis “perdagangan gelap” dengan Singapura atau Manila, suatu kelanjutan dari pengalaman zaman revolusi, tetapi kini orientasinya berbeda. Kalau di zaman revolusi tujuannya ialah untuk membiayai “perjuangan”, di tahun 1950-an selain untuk menghidupi anggota satuan yang tidak mendapat cukup biaya dari pusat, juga untuk menarik dukungan dan kesetiaan prajurit kepada panglima, di samping untuk menaikkan citra kepemimpinan panglima di mata komando pusat. Sebaliknya kepala staf tentara di pusat bukan tidak tahu keadaan ini dan mereka membiarkan apa yang tak mungkin dapat dicegah karena keterbatasan alat kontrol militer di pusat. Lagi pula kesetiaan panglima daerah lebih cenderung berpaling ke wilayah mereka daripada ke pusat. Selain itu hubungan komando tentara,

terutama Angkatan Darat dengan pemerintah pusat juga tidak harmonis, sebagian karena kekecewaan militer terhadap pemerintah sipil di zaman revolusi.⁸ Dalam tahun 1956 ada tanda-tanda bahwa kelompok tentara telah mengintervensi otoritas pemerintah pusat, seperti yang terjadi pada bulan Agustus 1956, saat panglima devisi Jawa Barat mengeluarkan perintah penangkapan atas Roeslan Abdulgani, tokoh PNI yang waktu itu Menteri Luar Negeri, atas tuduhan melakukan tindak korupsi. Ia kemudian dibebaskan atas campur tangan Perdana Menteri Ali Sastroamdjoko.⁹ Tanda-tanda bahwa pihak tentara (angkatan darat) kecewa dengan rejim pemerintah pusat yang kehilangan wibawa di mata panglima, makin muncul ke permukaan ketika pada bulan Maret 1957 terjadi pembangkangan di kalangan angkatan darat secara sepihak di Sumatera dan di Indonesia Timur. Panglima dan jajaran militer di sana menyatakan berlakunya keadaan darurat perang (*martial law*). Di Manado, pernyataan itu dimasukkan dalam apa yang dinamakan Piagam Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Kelompok Permesta ini kemudian bergabung dengan pemberontak PRRI di Sumatera di bawah kepemimpinan Ahmad Husein tahun 1958-1961.

Pemberontakan Aceh, seperti halnya dengan sejumlah pemberontakan lain di seluruh Indonesia tahun 1950-an, hanyalah gunung es dari kekecewaan terhadap cara pemerintah

⁸ Ulf Sundhaussen. 1986. *Politik Militer Indonesia: Menuju Dwifungsi ABRI*. (Tejemahan). Jakarta: LP3ES.

⁹ J.D. Legge. 1964. *Indonesia*. Sydney: Prentice Hall Australia, 2nd Edition, p. 167

pusat menangani daerah, baik politik maupun militer. Sebenarnya kalau dilihat dari akar persoalannya, tidak satu pun di antara pemberontakan itu benar-benar merupakan gerakan separatis sebagaimana cap yang diberikan dalam banyak literatur sejarah selama ini. Pemberontakan itu hanyalah gunung es dari keputusan terhadap dominasi pusat terhadap daerah. Satu-satunya gerakan besar yang pada ujung-ujungnya bernada separatisme ialah Darul Islam (DI) di Jawa Barat. Namun aspirasinya tetap dalam kerangka ke-Indonesia-an. Gerakan itu telah meletus tahun 1948 dari kekecewaan dan ketidakpuasan kalangan politisi Islam garis keras terhadap politik perundingan Republik yang dinilai terlalu memberi konsesi terhadap Belanda. Ini senada dengan gerakan PP dari kelompok sekuler pimpinan Tan Malaka. Menurut S.M. Kartosuwiryo, tokoh utama DI, prinsip Islam tidak pernah dapat dikompromikan dalam kerangka Indonesia merdeka melalui perundingan-perundingan dengan Belanda seperti yang dirundingkan oleh Sukarno dan Hatta waktu itu. Pada tahun 1949 DI memproklamasikan dirinya sebagai “Negara Islam Indonesia”. Pada awal 1950-an gerakan ini segera menyebar luas dari Jawa Barat ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh dan sampai tingkat tertentu memiliki pendukung yang kecil di daerah lain. Meskipun gerakan DI, seperti halnya gerakan pemberontakan di daerah-daerah lain selama tahun 1950-an dapat dipadamkan dengan cara militer, perasaan anti-Jakarta tidak dengan sendirinya dapat hilang begitu saja bersamaan dengan hilangnya gerakan. Untuk

sebagian besar ini disebabkan oleh fakta bahwa cara-cara pusat menangani penyelesaian akhir hanya terhenti sebatas permukaan, tetapi tidak menguak sampai ke akar persoalan dan menyeluruh. Keengganan atau kelalaian pusat dalam menuntaskan persoalan hubungan pusat daerah sebagian disebabkan oleh krisis-krisis baru menyusul setelah pasifikasi dan sebagian lain karena rejim Jakarta sedang bergerak ke arah kediktatoran pribadi.

E. Hubungan Pusat-Daerah Dalam Perbandingan: Era Orde Lama dan Orde Baru

Demokrasi liberal era 1950-an adalah jawaban dari euforia kemerdekaan yang dicapai selepas pengakuan kedaulatan di penghujung 1949. Namun dalam perjalanannya Sukarno mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Dalam tahun 1957 ia telah mengisyaratkan kepada rakyat, bahwa demokrasi liberal yang mencontoh gaya Barat telah gagal memenuhi tuntutan khas bangsa Indonesia. Sebagai gantinya ia menyerukan supaya dibentuk suatu gagasan demokrasi yang khusus kepunyaan Indonesia, yaitu “demokrasi terpimpin” dan bukan “demokrasi 50% + 1”. Inspirasi demokrasi Indonesia haruslah mencontoh demokrasi desa, di mana masalah-masalah diperbincangkan dan diputuskan secara “musyawarah dan mufakat”.

Perkembangan-perkembangan selepas Pemilu 1955, persaingan antarpartai yang makin kasar dan konfrontatif, pengunduran diri Wakil Presiden Moh. Hatta, pembangkangan daerah dan krisis ekonomi menandai

bagi dimulainya zaman baru. Pada 1959, Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang dan mengembalikan Negara pada UUD 1945 dengan sistem pemerintah presidensial yang kuat. Setelah membubarkan Parlemen dan Konstituante hasil Pemilu 1955, ia membatalkan semua ketentuan hukum yang tadinya memungkinkan dewan perwakilan daerah untuk memilih pemimpin eksekutif mereka masing-masing. Sejak itu kepala daerah akan kembali diangkat atas dasar otoritas pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepadanya. Sekali lagi pemerintah daerah kehilangan otonomi dan hanya berperan hanya sebagai perpanjangan tangan otoritas pusat. Pernyataan darurat perang oleh Sukarno dengan sendirinya mengakhiri eksperimen Indonesia dalam berdemokrasi, yaitu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, yang menandai suatu perubahan haluan baru dari sebuah rejim yang kemudian disebut Orde Lama menuju pola politik otoriter dan dominasi tentara yang berlangsung sampai 1990-an.

Dengan Dekrit Presiden 1959, Presiden Sukarno mulai mengukuhkan kedudukannya sendiri lewat formula demokrasi terpimpin, yang memungkinkannya tidak hanya turut campur tangan dalam politik, tetapi ia sendiri yang memimpinnya. Kuasa semua partai politik telah dilucuti dan makin merosot, kecuali partai komunis (PKI) dengan sigap berupaya mengeruk keuntungan sebagai pengikut setia sang presiden. Kecuali PKI, militer, khususnya angkatan darat, tampil sebagai perisai rejim yang sejak 1959 citranya mulai meningkat karena keberhasilannya menumpas

pemberontakan daerah. Maka selama Orde Lama struktur politik rejim mengalami perubahan signifikan. Presiden tampil menjadi orang nomor satu dalam politik dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Bersama militer dan PKI panggung politik rejim Sukarno diisi oleh kekuatan “triumvirate”: Sukarno, militer dan PKI sebagai pengikut setia presiden yang makin condong ke otoritarianisme. Meskipun antara PKI dan militer tidak pernah akur, kesetiaan keduanya diperlukan presiden untuk menjaga keseimbangan dalam melawan musuh-musuh revolusi. Langkah penting berikutnya ialah pembentukan sebuah majelis atau Dewan Nasional, pengganti Parlemen dan Konstituante yang telah dibubarkan. Dewan itu dalam arti sebenarnya adalah wakil rakyat, karena ia lebih dari sekedar parlemen, wakil-wakil partai, tetapi wakil “golongan karya” di mana tergabung kelompok non-politik: petani, pemuda, perempuan, golongan agama, etnik dan profesi lainnya. Dalam iklim politik domestik yang serba darurat, bersamaan dengan pusat gravitasi politik internasional yang diwarnai oleh ketegangan antara blok kapitalis (Barat) dan komunis (Timur) selama Orde Lama, indonesianya Sukarno tentu beda dengan Indonesia Suharto.¹⁰

¹⁰ Sekedar uraian pengantar yang secara eksplisit menggunakan judul semacam ini, lihat misalnya, Hal Kosut. 1967. *Indonesia: Sukarno's Years*. New York: Facts on File; Hamish McDonald. 1980. *Suharto's Indonesia*. Blackburn, Victoria, Australia: Fontana Books; Donald K Emmerson (ed). 2001. *Indonesia Beyond Soeharto. Negara, Ekonomi dan Masyarakat Transisi*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Gramedia; Harold Crouch. 1967. “Military Politics Under

Bila Sukarno berbicara dalam bahasa “revolusi”, Suharto berbicara dalam bahasa modernisasi alias “pembangunan”. Apakah pidato-pidato Sukarno yang menggelora selama ia berkuasa itu, benar-benar menggiring bangsa ini ke kancah “revolusi” [yang belum selesai] dan terjadinya perubahan-perubahan revolusioner, tentu masih dapat dipertanyakan lagi. Begitu juga sepak terjang Suharto. Banyak yang meragukan apakah “pembangunanisme” zaman Suharto telah menerapkan modernisasi dan pembangunan.¹¹ Modernisasi itu sendiri, baik teori maupun praktik, sudah lama digugat. Memang, di bawah rejim militer Suharto, *rust en orde* kelihatannya dicapai, tetapi fakta yang terjadi sebetulnya tak lain, meminjam Scott, adalah “pembungkaman” karena tekanan dan dominasi penguasa pusat terhadap pinggiran.¹² Kondisi ekonomi yang merosot tajam pada akhir kekuasaan Sukarno kemudian dapat dihentikan dan ketegangan politik yang mengakhiri kekuasaannya kemudian juga terulang di zaman Suharto.

Dalam memperbandingkan kedua rejim yang paling berkuasa di Indonesia itu, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan politik, militer dan ekonomi pusat-daerah, uraian berikut ini hanyalah sebuah ikhtisar yang memerlukan diskusi lebih lanjut. *Pertama*, dasar dari

Indonesia’s New Order”, *Pacific Affairs*, No 2 (1967): 206-19.

¹¹ Crouch, *Ibid.* p. 206.

¹² Lihat James Scott. 1990. *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale Univ. Press.

kebijakan kedua presiden Indonesia itu dimulai dengan penolakan terhadap kebijakan rejim sebelumnya. Presiden Sukarno mengkhawatirkan perkembangan demokrasi parlementer karena menurutnya partai-partai terlalu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tetapi alpa dengan persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi bangsa ini. Pada bulan Oktober 1956 ia mengutuk partai-partai politik yang hanya mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan negara dan menyerukan agar “menghapuskan perasaan kepartaian”. Karena tidak ada tanda-tanda diindahkannya peringatan itu, Sukarno kemudian menguburkan partai-partai.

Di era Orde Baru Suharto, partai-partai tidak perlu dikuburkan, kecuali hanya disederhanakan, mula-mula menjadi sepuluh, kemudian tinggal dua saja (PPP dan PDI) ditambah Golkar. Namun pada hakekatnya hanya ada satu golongan mayoritas tunggal, yaitu Golkar yang pada berkuasa enggan disebut partai, meskipun peran yang dimainkannya lebih dari sekedar partai, melainkan juru bicara rejim, seperti halnya PKI di zaman Orde Lama. Kemacetan partai dalam memerankan dirinya, terutama sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah, mengakibatkan komunikasi politik antara daerah dan pusat tidak berjalan normal. Persepsi yang berbeda-beda mengenai isu dan agenda nasional telah menyediakan jurang perbedaan antara pusat dan daerah dan sampai tingkat terakhir menyulut api pemberontakan.

Kedua, kedua rejim ini telah menyelesaikan perlawanan daerah dengan pendekatan militer dan

melembagakan kekuasaan pusat di daerah, baik lewat undang-undang maupun lewat pembentukan istitusi pusat di daerah lewat kebijakan penyeragaman di hampir setiap bidang. Manakala Sukarno memberlakukan undang-undang darurat, Suharto merumuskan UU No.1974 yang menetapkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan sifat otonomi daerah. Langkah-langkah ini memperkuat kecenderungan sentralisasi yang semakin kuat yang telah dimulai oleh Sukarno, dengan dukungan militer, pada 1959. Secara teknis, langkah tahun 1965 yang akhirnya mengakibatkan jatuhnya Sukarno. Namun secara substansial, Undang-Undang No. 5 tahun 1974 merupakan penolakan langsung dari jiwa desentralisasi dan demokratisasi yang dirumuskan lewat Undang-Undang No.1 tahun 1957.

Dengan demikian, upaya melonggarkan kekuasaan pusat tidak ada dalam agenda Soeharto. Ketika mengambil alih kekuasaan dari tangan Sukarno tahun 1966, menyusul kudeta yang gagal dari para perwira sayap kiri pada 1965, prioritas kebijakan pemerintah yang baru bertentangan arahnya: yakni menuju penegakan kekuasaan pusat atas birokrasi dan militer yang terbagi dan yang dipolitisir, termasuk langkah-langkah untuk lebih lanjut menyentralisasikan hubungan Jakarta dan daerah. Kebijakan paralel guna mende-politisasi masyarakat (massa mengapung) dan membatasi persaingan politik semakin mengurangi kemampuan aktor regional untuk mengerahkan dukungan bagi kepentingan setempat.

Ketiga, kontinuitas sejarah rejim Sukarno ke rejim Sukarno tetap signifikan, tetapi juga berbahaya kalau mengaburkan fakta bahwa kontras dan keunikan antara keduanya juga sama signifikannya dalam perbandingan. Tiga kasus perlawanan daerah di masa Orde Baru: Aceh, Irian Barat (Papua) dan RMS Maluku sudah berakar sejak rejim sebelumnya, namun pada masa rejim Suharto, ketiganya diperumit dengan masuknya unsur-unsur kapitalisme global. Secara materil, Jakarta tampak bersikap bermurah hati kepada provinsi-provinsi. Kenaikan harga minyak bumi pada 1970-an dan penambahan pemasukan dari sector nonminyak dan nongas dimulai pada akhir 1980-an, misalnya memungkinkan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah secara memadai dan bonus-bonus semacam ini tidak ditemukan di masa rejim Sukarno. Ini dapat dimengerti karena dimasa Sukarno “politik adalah panglima” dan sebaliknya di masa Orde Baru ekonomilah yang jadi panglimanya. Namun secara keseluruhan persoalannya tetap sama, keduanya presiden RI itu gagal menciptakan hubungan yang berkeadilan antara pusat daerah karena kebijakan yang dibuatnya situasi yang mengitarinya makin menggiring kedua orang paling berkuasa di Indonesia itu menjadi penguasa otoriter.

Cita-cita kebangsaan Sukarno muda di masa pergerakan nasional, seperti halnya dengan Moh. Yamin, ingin mengembalikan zaman “keemasan” Majapahit. Penggantinya, Suharto menginginkan reinkarnasi Mataram terutama zaman Sultan

Agung dengan konsolidasi tentaranya. Akan tetapi Orde Baru, menurut Anderson, merupakan pelanjut setia yang kreatif rezim kolonialisme Belanda. Seperti Negara kolonial, Orde Baru bekerja lebih karena dorongan-dorongan dari dirinya sendiri ketimbang melayani tuntutan rakyat. Semua kebijakan Orde Baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan digiring bagi penguatan *state-qua-state* atau *state-for-itself*. Dengan kata lain, negara yang dikonstruksikan Suharto, telah menjadi dirinya sendiri (*a state of its own*) untuk melayani rejim, terlepas dari berbagai kepentingan dan kehendak rakyat banyak. Ini sejalan dengan konsep negara dalam paham kekuasaan Jawa, di mana kekuasaannya, seperti dijelaskan Ben Anderson, tidak ditentukan oleh wilayah periferi, melainkan oleh pusat. Integrasi hanya dimengerti sebagai kesatuan wilayah politis menurut kehendak Jakarta dan bukan atas kemauan politik bersama antara daerah dan pusat. Itulah paham kesatuan (*unitarianisme*) dalam konsep kekuasaan Jawa. Konsep unitarisme ini, menurut Prof. Soepomo, mengandung benih-benih totalitarianisme. Di tangan Hitler di Jerman dan Musollini di Italia konsep unitarisme semacam itu mendorong timbulnya kejahatan negara atas hak asasi manusia (HAM) seperti juga terjadi di Indonesia era Orde Baru.

Mohammad Hatta sebenarnya sejak awal sudah mengingatkan, bila negara Indonesia berbentuk kesatuan akan menuai persatuan nasional. Kekhawatiran Hatta akan paham unitarianisme yang Jawa-centris terbukti benar. Begitu imperium Suharto bangkrut, banyak masyarakat

terang-terangan mempertontonkan sentimen anti Jawa. Aceh dan Irian Jaya menyatakan ingin bebas dari kolonialisme Jawa. Semua ini, meminjam istilah John Pemberton, dalam *On the Subject of "Java"* (1994), merupakan *cultural effect* Jawa-nisasi politik Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Ben Anderson, gagasan ini jelas tetap relevan dan kontekstual untuk mencegah agar Indonesia tidak dikeping-keping disintegrasi hingga menjadi belasan republik kecil yang kejanya bertikai melulu seperti negara-negara eks Yugoslavia di Semenanjung Balkan.

F. Penutup: Harapan dan Kekecewaan

Kesimpulannya, secara politik, militer, ekonomi, perbenturan pusat daerah lebih cenderung berasal dari kebijakan pusat yang menindas dan kurang berkeadilan. Orde Baru memperlakukan ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat dengan membangun hubungan-hubungan kekuasaan dan ekonomi via jaringan primordial. Berbeda dengan tahun 1950-an, sumber ekonomi dan militer di zaman Orde Baru tidak langsung diawasi daerah. Orde Baru mengorganisasi Indonesia ke dalam daerah-daerah yang secara hukum "administratif" dan "otonom" pada waktu yang ber-samaaan, dan menggunakan ambiguitas ini untuk memperlakukan mereka dalam praktek sebagai perluasan administratif kekuasaan pusat, sama seperti pada zaman Belanda. Ironinya cukup jelas. Karena secara historis disahkan sebagai suatu reaksi nasionalis terhadap usaha Belanda untuk memaksakan federalisme yang bersifat memecah dan mepemerintah di nusantara menyusul

Perang Dunai II, Orde Baru yang mirip dengan contoh kolonial sangat mendukung kesatuan semakin sebelumnya.***

KEPUSTAKAAN

- Anderson, Bennedic. O. R.G. 1983. "Old State, New Society: Indonesia's New Order on Comparatisme Historical Perspective". *Journal Of Asian Studies*. Vol. 42 No. 3 (1983): 477-98.
- Emmerson, Donal K. 2001. *Indonesia Beyiod Soeharto. Negara, Ekonomi dan Masyarakat Transisi*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Gramedia.
- Emerson, Rupert. 1959. *From Empire To Nation. The Rise to Self-Assertiom of Asian and Asfrican Peoples*. Boston: Beacon Press,
- Kosut, Hal. 1967. *Indonesia: Sukarno's Years*. New York: Facts on Fila.
- Legge, J. D. 1964. *Indonesia*. Sidney: Prentice Hall Australian, 2 Edition.
- McDonald, Haminsh. 1980. *Suharto's Indonesia*. Blackburn, Victoria, Australia: Fontana Books.
- Mestika Zed, 2001. "Hiden History. Sejarah Kebrutalan dan Kejahatan Negara. Isu-Isu dan Strategi dalam Konteks Sejarah Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan HAM* [Habibie Center], Vol 2 No.1 (2001).
- Robinson, Ricahard (ed). 1990. *Power and Economy in Suharto's Indonesia*. Manila: Journal of Cont. Asia Publishers.
- Scott, James. 1990. *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale Univ. Press.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia: Menuju Dwifungsi ABRI*, Terjemahan. Jakarta: LP3ES.